

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga stabilitas demokrasi sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, mengumpulkan berbagai kepentingan, serta menjadi jalur untuk mewujudkan para pemimpin politik. Oleh karena itu, syarat utama dalam menjalankan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dipilih secara teratur, serta kebebasan politik untuk memastikan proses pemilihan berjalan sah. Sebab partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan demokrasi di sebuah negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah negara yang tidak memiliki partai politik tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi, karena partai politik adalah salah satu komponen utama dari sistem demokrasi (Matera, 2011).

Dalam praktiknya, partai politik di Indonesia masih sering menghadapi masalah terkait demokrasi internal. Cara mengambil keputusan cenderung dipegang oleh kelompok elite, sedangkan keterlibatan anggota dan kader biasanya hanya berupa tanda tangan saja. Situasi ini membuat partai rentan terhadap perselisihan antar elit, praktik pemberdayaan kelompok tertentu, serta campur tangan dari pihak luar. Maka dari itu, perubahan kepemimpinan dalam partai politik menjadi hal yang penting untuk di analisis secara mendalam agar memahami cara kekuasaan berjalan di dalamnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik memiliki tujuan khusus, yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik dari anggota partai serta masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan politik dan pemerintahan. Tujuan ini didasari keyakinan bahwa dengan membuat sebuah organisasi, mereka bisa mengumpulkan orang-orang yang punya pikiran dan tujuan yang sama, sehingga pikiran serta langkah mereka bisa berjalan tertib dan selaras. Oleh karena itu, dampak mereka bisa lebih besar dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan. (Budiardjo M. ,

2009).

Pada dinamika politik nasional pasca pemilu 2024, politik Indonesia sedang mengalami perubahan yang cukup besar. Terjadi pergeseran dalam aliansi kekuasaan, konsolidasi para elite nasional, serta perubahan posisi partai-partai besar. Hal ini menunjukkan bahwa partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar, tertua, dan paling berpengaruh di Indonesia kembali menjadi pusat perhatian publik setelah terjadinya pergantian kepemimpinan secara mendadak. Pergantian ini tidak hanya sekedar urusan administratif, tetapi juga mencerminkan adanya dinamika internal dan eksternal yang kompleks. Dalam konteks ini, dinamika internal partai menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dinamika partai disini mencakup proses perubahan struktur organisasi, cara penggantian pemimpin, munculnya konflik di antara para elite, serta kemampuan partai untuk menyesuaikan diri dengan kondisi politik nasional. Konsep ini, seperti yang dibahas dalam beberapa penelitian tentang sistem kepartaian dan perubahan politik di Indonesia, menunjukkan bahwa partai politik tidak tetap, melainkan mengalami berbagai fase seperti konsolidasi, regenerasi, dan perubahan strategi politik.

Partai Golkar merupakan salah satu partai politik terbesar yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Partai ini dikenal memiliki sistem organisasi yang teratur, struktur pengurus yang kompleks, dan tradisi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam partai. Sejak masa orde baru hingga masa reformasi, Golkar di kenal memiliki kedekatan yang kuat dengan kekuasaan, serta terus bertahan dalam berbagai tantangan politik dengan cara melakukan penyesuaian struktur dan menempatkan kembali tokoh-tokoh penting. Sebagai partai besar, Partai Golkar juga memiliki peran sentral dalam dinamika politik nasional. Namun sepanjang sejarah partai, pada dekade terakhir partai Golkar mengalami berbagai dinamika, yang dimana kepemimpinan dalam partai yang sering dihadapkan pada berbagai persoalan internal, terutama berkaitan dengan kepemimpinan, konflik faksional, serta kemungkinan adanya campur tangan kekuasaan eksternal yang kerap memengaruhi arah politik, termasuk pergantian ketua umum (Bbc, 2024).

Pada tahun 2017 Airlangga Hartarto terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar setelah mengisi kekosongan kepemimpinan akibat masalah hukum terhadap Setya Novanto. Kepemimpinan Airlangga Hartarto dianggap mampu menjaga stabilitas partai sekaligus mengembalikan elektabilitas Golkar. Selain itu, Partai Golkar juga mampu mempertahankan posisinya sebagai bagian dari koalisi pemerintahan serta berhasil mengamankan kembali posisi sebagai partai terbesar kedua secara nasional dengan peningkatan perolehan suara dan penguatan posisi di berbagai tingkat legislatif dan eksekutif daerah. (Kompas, 2024). Keberhasilan tersebut semestinya memperkuat legitimasi Airlangga sebagai ketua umum.

Namun, stabilitas tersebut tidak serta merta mencerminkan kuatnya pelembagaan demokrasi internal partai. Memasuki akhir tahun 2024, Golkar menghadapi masa yang sangat penting, dimana Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum partai Golkar menjadi salah satu fakta politik yang mengejutkan dalam perpolitikan Indonesia. Pengunduran diri ini menandai dimulainya transisi kepemimpinan baru. Airlangga yang selama dua periode memimpin Golkar dan sebelumnya dikenal memiliki posisi kuat baik di internal partai maupun dalam struktur pemerintahan, tiba-tiba menyatakan mengundurkan diri. Keputusan ini diambil dengan alasan menjaga keutuhan partai dan stabilitas transisi pemerintahan yang sedang berlangsung. Langkah ini membuat banyak pihak terkejut, terutama karena terjadi di tengah persiapan partai menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada), proses konsolidasi politik setelah pemilu nasional serta mundur menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional (Kompas, 2024). Pemilu dan pilkada biasanya menjadi waktu yang membutuhkan kestabilan di dalam partai. Namun kejadian ini juga memicu berbagai spekulasi, apakah ini semata keputusan strategis partai hasil tekanan politik internal, atau refleksi perubahan konstelasi kekuatan nasional. Mengingat tidak adanya konflik terbuka yang sebelumnya mencuat ke ruang publik. Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi keputusan Airlangga, diantaranya rasa tidak puas dari kalangan elite partai, aspirasi perubahan dari akar rumput, serta tekanan dari eksternal akibat perubahan cepat dalam dinamika politik nasional (Bbc.com, 2024). Fenomena secara tiba-

tiba ini menjadi titik awal identifikasi masalah, sebab perubahan drastis dalam kepemimpinan politik jarang terjadi tanpa adanya dinamika yang mendalam.

Ketika seorang tokoh seperti Airlangga yang sebelumnya terlihat solid, terintegrasi dalam pemerintahan, dan tidak memiliki oposisi kuat yang terlihat memutuskan mundur secara tiba-tiba, maka fenomena tersebut tidak bisa dianggap hanya sebagai peristiwa individual. Mundurnya secara mendadak memberikan sinyal adanya tekanan politik tertentu, perubahan dalam hubungan kekuasaan, atau upaya mengkonsolidasikan elite yang ingin mengubah arah kepemimpinan Golkar. dalam pandangan studi politik, hal seperti ini biasanya menunjukkan perubahan dinamis dikalangan elite, dimana para aktor politik melakukan penyesuaian posisi, menegosiasikan ulang kekuasaan, atau mempersiapkan arah baru menjelang siklus politik tertentu. Oleh karena itu, munculnya dugaan bahwa mundurnya Airlangga bukanlah kejadian spontan, melainkan bagian dari proses politik yang lebih kompleks dan terstruktur.

Pengunduran diri Airlangga yang dilakukan secara mendadak dan tanpa konflik terbuka sebelumnya memperkuat dugaan adanya konflik laten didalam tubuh Partai Golkar. Serta menjadi perubahan besar dalam arah Partai Golkar yang akan memengaruhi secara strategis partai itu sendiri serta peta politik nasional. Sehingga pengunduran ini berdampak pada percepatan Munas Golkar yang semula dijadwalkan pada Desember 2024 menjadi Agustus 2024. Langkah tersebut menimbulkan tanda tanya karena tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme pengambilan keputusan dan pemilihan kepengurusan yang diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.

Seorang pemimpin dalam partai politik bisa dibandingkan dengan organisasi yang memiliki peraturan dan cara kerja yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga AD/ART. Sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang tentang partai politik, disebutkan bahwa “kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.” Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golkar, terdapat dua jenis musyawarah yang digunakan sebagai tempat untuk menentukan pergantian

kepemimpinan, yaitu Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Musyawarah Nasional adalah pertemuan yang memiliki wewenang tertinggi dalam partai dan diadakan sekali setiap lima tahun. Sementara itu, Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah jenis Musyawarah yang dilakukan dalam kondisi tertentu dan dapat diadakan berdasarkan permintaan atau izin dari setidaknya dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (Ghafur M. Y., 2017).

Sebelum Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, sudah ada berbagai isu yang mengkhawatirkan mengenai posisinya sejak pertengahan tahun 2023. Isu tersebut muncul karena adanya usulan dari Ridwan Hisjam selaku Dewan Pakar Partai Golkar yang mengusulkan agar Airlangga segera mundur dan meminta diadakannya Munaslub untuk mengganti posisi Airlangga. Hal ini terjadi karena Airlangga dinilai gagal dalam menyelesaikan tugas partai, khususnya soal persiapan mengikuti pilpres 2024, sebab hal tersebut di picu oleh kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) serta dugaan kasus kontainer dilepas (Kompas, 2024). Dari situ mulai dipersiapkan rencana penunjukan calon ketua umum dan formatur baru, serta nama calon terkuat yang di usulkan adalah Bahlil Lahadalia yang di anggap mewakili keinginan internal partai untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Padahal, Bahlil bukanlah figur lama di struktur inti partai statusnya sebagai pengurus pusat (DPP) tidak aktif, meskipun ia adalah kader Golkar (tirto.id, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Golkar membuka kemungkinan bagi non-kader struktural lama untuk masuk dalam kompetisi kepemimpinan.

Sebagai figur yang berasal dari latar belakang pengusaha dan juga menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan, menjadi wajah baru dalam struktur elit Partai Golkar. Kehadiran Bahlil menunjukkan adanya perubahan dalam cara kepemimpinan partai ini, yang sebelumnya didominasi oleh para elit lama dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di dalam partai. Perubahan ini menciptakan perbedaan dalam kepentingan antar faksi-faksi di dalam partai, baik antara elit senior dengan elit baru, maupun antara pengurus pusat dengan pengurus daerah, yang memiliki visi dan strategi berbeda

terhadap arah dan kebijakan partai.

Pada akhirnya dalam Musyawarah Nasional XI Golkar yang digelar di Jakarta pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, Bahlil Lahadalia akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum DPP partai Golkar periode 2024-2029 melalui mekanisme aklamasi. Bahlil menjadi calon tunggal yang lolos verifikasi dan didukung secara bulat oleh peserta Munas dan Dewan Pimpinan Daerah partai Golkar (CNN Indonesia, 2024). Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah proses politik di tubuh partai masih sepenuhnya bersandar pada mekanisme kompetisi internal atau telah dipengaruhi oleh relasi patronase kekuasaan. Proses pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar menunjukkan adanya pertarungan kepentingan antara kebutuhan mempertahankan persatuan di dalam partai dan tekanan untuk tetap terlibat dalam lingkaran kekuasaan nasional. Terpilihnya Bahlil Lahadalia kemudian menimbulkan pertanyaan apakah terdapat orientasi untuk menjaga relasi politik partai dengan pemerintah pusat dalam proses suksesi tersebut. Terlebih Bahlil lebih dikenal sebagai seorang teknokrat yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan dikenal memiliki kedekatan erat dengan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu ketika seorang tokoh seperti Bahlil Lahadalia yang bukanlah figur lama di struktur inti partai mampu terpilih secara aklamasi, yang berarti tidak adanya kontestasi secara bulat yang menjadi peristiwa menarik sekaligus fenomena politik yang perlu dikaji secara mendalam. Meskipun demikian, langkah ini tidak terlepas dari adanya penolakan dari sebagian anggota partai yang menganggap bahwa proses pergantian kepemimpinan belum sepenuhnya mengikuti mekanisme demokrasi internal partai.

Dalam visi dan misinya, Bahlil menegaskan pentingnya menjadikan Golkar sebagai partai yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat, fokus pada peningkatan kualitas hidup dengan menyoal peningkatan pendapatan perkapita melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri nasional (Tempo, 2024). Dukungan besar terhadap figur eksternal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai independensi partai serta sejauh mana keputusan politik diambil secara mandiri tanpa tekanan kekuasaan.

Dinamika ini menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh partai

politik besar dalam menyeimbangkan antara mempertahankan kebebasan organisasi dan beradaptasi secara praktis untuk tetap eksis dalam lanskap politik nasional yang selalu berubah. Sebagai hasilnya, proses pengambilan keputusan yang seharusnya bersifat demokratis sering kali terhambat oleh pengaruh elite dan kepentingan kekuasaan yang bisa memperlemah institusionalisasi partai serta kualitas kepemimpinan politik di Indonesia. Maka dari itu, ketika seorang tokoh seperti Bahlil Lahadalia yang sebelumnya tidak terlihat menempati posisi strategis dalam kepengurusan inti partai mampu terpilih secara aklamasi, yang berarti tidak adanya kontestasi secara terbuka yang menjadi peristiwa menarik sekaligus fenomena politik yang perlu dikaji secara mendalam. Situasi ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa keputusan kepemimpinan Golkar bukan sepenuhnya hasil dari mekanisme partai yang independen, melainkan juga produk dari hubungan kuasa antara elite partai dan penguasa negara. Oleh karena itu, muncul kritik dari sebagian kalangan bahwa Munas dan proses aklamasi di Golkar berpotensi melemahkan demokrasi internal dan lebih mengedepankan pola patronase serta politik kekuasaan.

Setelah Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Golkar untuk periode 2024-2029. Muncul berbagai perubahan politik di dalam internal partai. Proses pemilihan yang berlangsung tanpa adanya perlawanan resmi menjadi momen penting dalam sejarah partai yang memiliki peran penting dalam dunia politik Indonesia. Kepemimpinan Bahlil Lahadalia bukan hanya sekedar pergantian pemimpin, tetapi juga menunjukkan perubahan arah dan strategi partai Golkar yang perlu dianalisis secara mendalam.

Fenomena ini tidak hanya mencakup perpindahan konflik terbuka, tetapi juga perubahan kepemimpinan dalam tubuh partai, serta memperlihatkan pola baru hubungan antara elite partai dan kekuasaan negara. Proses ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik Indonesia setelah pemilu 2024, dinamika internal terlihat melalui pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum DPP Partai Golkar hanya beberapa bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya dan sebelum pelaksanaan Munas XI partai

Golkar, yang kemudian diikuti oleh pemilihan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum secara aklamasi pada munas tersebut (Kompas, 2024). Yang berarti keputusan penting dipartai besar tidak hanya ditentukan oleh perubahan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Bahlil sebagai figur non-elite partai, dapat naik menjadi ketua umum bukan hanya dukungan dari internal, tetapi juga karena legitimasi politik yang diberikan oleh pusat kekuasaan. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi representasi konkret bagaimana patronase dan konflik politik saling memengaruhi dalam menentukan arah kepemimpinan partai. Ditambah dengan pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa ia tidak didukung oleh Partai Golkar dan bukan anggota partai tersebut saat menjadi menteri memicu perhatian dalam dunia politik. Hal ini terjadi karena meskipun sebelumnya ia terlibat dalam struktur Golkar di tingkat daerah, statusnya secara administratif dan peran politiknya berbeda. Perbedaan ini juga memengaruhi cara publik memandang tokoh tersebut (Metrotvnews, 2023). Jadi dapat disimpulkan bahwa segala problematik ini muncul setelah mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai Golkar dan munculnya Bahlil sebagai ketua umum partai Golkar yang baru.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini bertujuan memahami bagaimana dinamika internal partai Golkar berlangsung dalam proses pemilihan ketua umum periode 2024-2029. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekurangan dalam kajian akademik mengenai dinamika internal Partai Golkar selama proses perebutan kekuasaan, yaitu menganalisis keluarnya Airlangga Hartarto dan perubahan dinamika internal partai yang memungkinkan Bahlil Lahadalia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk periode 2024–2029. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori elit vilfredo, teori patronase politik oleh Edward Aspinall, serta konsep Musyawarah mufakat dan aklamasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan kekuasaan dan praktik demokrasi di dalam partai politik Indonesia. Maka penulis akan melanjutkan penelitian dengan judul **“Dinamika Terpilihnya Bahlil lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024-2029”**

Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika internal Golkar dan kemungkinan adanya tekanan eksternal memengaruhi kemunduran Airlangga Hartarto dan proses terpilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi. Fenomena ini memunculkan dugaan adanya kesenjangan antara idealisme demokrasi internal partai dan praktik politik yang berkembang dalam proses suksesi tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya kajian ilmiah untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan dan proses aklamasi dalam tubuh partai Golkar dapat terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaca dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulis memandang bahwa kemunduran Airlangga ada kaitannya dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029 yang dimana merupakan sebuah peristiwa politik yang penuh akan dinamika internal maupun eksternal partai. Proses pemilihan secara aklamasi yang tampak mencerminkan kesepakatan bulat justru mengundang pertanyaan mengenai sejauh mana demokrasi internal benar-benar dijalankan dalam tubuh Partai Golkar. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika sosok yang diangkat bukanlah bagian dari elite struktural partai sebelumnya, melainkan figur yang lebih dikenal sebagai tenokrat dan loyalis pada pusat kekuasaan. Oleh karena itu, sebagai Penulis penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang mendalam untuk memahami lebih jauh bagaimana bisa Airlangga mundur secara tiba-tiba dan dalam waktu yang sama dengan terpilihnya Bahlil, bagaimana konfigurasi kekuatan politik internal Partai Golkar membentuk suatu konsensus yang memungkinkan aklamasi ini terjadi serta menganalisis peran faktor internal dan eksternal dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut. Mengingat posisi Partai Golkar sebagai partai besar dengan sejarah panjang dalam politik nasional, perubahan kepemimpinan ini bukan hanya mencerminkan pergeseran arah politik partai tetapi juga menjadi cerminan dari pola-pola konsolidasi kekuasaan yang terjadi dalam demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024.

1.3 Pertanyaan penelitian

1. Mengapa Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024 Airlangga Hartarto mengundurkan diri?
2. Bagaimana dinamika internal Partai Golkar mengantarkan Bahlil Lahadalia terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Golkar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan yang ingin di capai dan di hendeaki dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Tujuan Akademik

1. Mengetahui mengapa Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024
2. Mengetahui bagaimana dinamika internal partai Golkar menghantarkan seorang Bahlil menjadi ketua umum partai Golkar, apakah ada indikasi tekanan dari luar internal.

1.4.2 Tujuan Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada publik dan kader partai mengenai dinamika kekuasaan dan pengaruh eksternal dalam proses regenerasi kepemimpinan partai politik di Indonesia
2. Memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan lembaga pengawas politik dalam merumuskan strategi untuk memperkuat demokrasi internal partai agar lebih transparan, kompetitif, dan bebas dari dominasi kekuasaan eksekutif
3. Menjadi referensi bagi pengamat politik dan praktisi politik dalam memahami bagaimana relasi kekuasaan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan konsolidasi terhadap dinamika internal partai dan strategi politik Golkar

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang menunjukkan pentingnya, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi dosen, mahasiswa,

dan peneliti lainnya yang tertarik meneliti terkait dinamika partai politik, kepemimpinan, serta hubungan antara partai dan kekuasaan negara.

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum Partai Politik dan peran Munas dalam demokrasi internal partai.
3. Diharapkan dapat menjadi rujukan teori yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori-teori politik yang berkaitan dengan aklamasi dalam pemilihan partai dan pengaruh elit politik yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada partai politik, pengamat politik, dan masyarakat umum tentang pentingnya menerapkan proses pemilihan pemimpin yang terbuka dan demokratis.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pengambil kebijakan dan pengurus partai politik dalam memperkuat mekanisme demokrasi, transparansi, serta independensi partai dari tekanan kekuasaan eksternal.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis akan membagi isi dalam 6 bab yang saling terkait dan dijelaskan secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian awal yang akan menjelaskan topik skripsi, mencakup latar belakang, mulai dari pembahasan aspek umum hingga memperjelas permasalahan yang mendasari fenomena tersebut serta fokus utama dari penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang diperoleh, serta sistematika penulisan sebagai pedoman dalam menulis skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan berbagai teori dan konsep yang relevan sebagai acuan dalam melakukan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemunduran Airlangga sebagai ketua umum Golkar bisa terjadi serta bagaimana dinamika terpilihnya Bahlil Lahadalia dan juga menggambarkan apa yang terjadi di dalam internal Golkar pada saat Munas sehingga muncul dugaan adanya tekanan dari eksternal, khususnya dari Presiden Joko Widodo pada saat itu. Pada bab ini penulis juga akan membahas penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, serta menjelaskan apa yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini agar dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Adapun konsep dan teori yang digunakan yaitu berhubungan dengan patronase dan konflik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan metode yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara, membaca buku referensi, serta mengumpulkan dokumen. Dan untuk memeriksa kebenaran data, penulis menggunakan triangulasi dan analisis data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Dalam gambaran umum ini, pembahasan awal akan membahas mengenai secara umum sejarah partai Golkar, dilanjutkan pada sejarah koalisi partai Golkar dalam piles dan pasca pilpres yang membahas bahwa Golkar tidak bisa lepas dari elit kekuasaan, dilanjutkan terkait ketentuan ad/art yang tercantum pada partai Golkar tentang kepemimpinan dan pemilihan ketua umum partai serta membahas terkait profil Bahlil Lahadalia dengan perjalanan karirnya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan penelitian beserta analisis mengenai dinamika pengunduran diri Airlangga Hartarto dan proses terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai

Golkar periode 2024–2029. Pembahasan dalam bab ini disusun dengan merujuk pada kerangka konseptual yang telah dijelaskan pada Bab II, dengan fokus pada dinamika internal partai, relasi kekuasaan di tingkat elite, serta pengaruh faktor eksternal dalam proses suksesi kepemimpinan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil wawancara bersama politisi Partai Golkar, Peneliti BRIN, dan pengamat politik dengan teori elite Vilfredo Pareto, teori patronase politik Edward Aspinall, serta konsep musyawarah mufakat dan aklamasi. Melalui pendekatan tersebut, bab ini tidak hanya menyajikan deskripsi kronologis peristiwa, tetapi juga menguraikan dinamika kepentingan dan relasi kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan politik di dalam Partai Golkar.

BAB VI

KESIMPULAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian mengenai dinamika pengunduran diri Airlangga Hartarto serta proses terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024–2029. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dirumuskan berdasarkan analisis teoritis dan temuan empiris yang telah diuraikan secara komprehensif pada Bab V.